

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 3
Provinsi : Bali
Pimpinan Sidang 1 : Agung M.H. Dorodjatoen, S.T., M.Sc., Ph.D. (Perencana Ahli Madya, Mewakili Direktur Pembangunan Daerah)
Pimpinan Sidang 2 : Wahyu Wijayanto, S.I.P., M.A. (Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif)
Notulis Aplikasi : Bulan Nirwana Sari (Direktorat Regional I)
Notulis Offline: Hafidh Aditama (Direktorat Regional I)
Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali 2. Pemerintah Kabupaten Klungkung 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Provinsi Bali 4. Bappeda Kabupaten Bangli 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 6. Bappeda Kabupaten Gianyar 7. Dinas Pertanian Provinsi Bali 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Pertanian 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7. Kementerian Lingkungan Hidup 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Transportasi 2. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional (PIKEI) 3. Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana (TRPPB) 4. Direktorat Pangan dan Pertanian 5. Direktorat Perumahan dan Permukiman

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
1	Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan - Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung Kode: 1	190	0	m	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR	Ditolak <i>Catatan Pimsid:</i> Dua alternatif tindak lanjut, yaitu (1) mengusulkan pengajuan Surat Gubernur ke Menteri PUPR untuk mendapatkan diskresi Menteri PUPR;	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		RBF - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			003 - Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN)
		Catatan dan Tanggapan						
Pemerintah Daerah			Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>Bappeda Provinsi Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan telah dibangun namun belum ada akses, sehingga perlu ada jembatan penghubung agar ada konektivitas dan juga mendorong pengembangan Pulau Nusa Penida sebagai pulau terluar. - RC sudah siap. - Pemda Klungkung menyiapkan anggaran untuk pengadaan lahan. - DED dilakukan oleh Pemprov Bali dengan melibatkan balai di Bali. - Pemda Klungkung telah menyampaikan dan bertemu dengan Menteri PUPR untuk ada diskresi Menteri PUPR. - Pelabuhan berstatus Pengumpulan Regional. Usul untuk dijadikan Lokpri DAK Afirmasi karena terletak di pulau terluar. <p>Pemkab Klungkung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pelabuhan di Pulau Ceningan sudah selesai, tetapi jembatan sebagai akses ke pelabuhan belum siap. - Jembatan yang ada saat ini lebarnya kurang memadai. - Tahun ini Pemkab Klungkung sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan, telah ada kesepakatan penyerahan lahan. 	<p>Kementerian PUPR (Bina Marga):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada jalan nasional yang menghubungkan Nusa Lembongan dengan Nusa Ceningan, hanya ada jalan kabupaten (kewenangan daerah). - Akses dari Nusa Lembongan ke Nusa Ceningan tidak ada dalam rencana umum jaringan jalan nasional dari KemenPUPR sehingga perlu diskresi khusus dari Menteri PUPR. - Jika ingin ada diskresi menteri bisa mengajukan surat dari Gubernur ke Menteri PUPR. - Status RC sudah di-<i>update</i>, perlu <i>review</i> DED. 	<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jembatan belum menjadi prioritas pusat. - Saat ini penanganan jalan daerah belum bisa ditangani melalui APBN. - Jika untuk pengusulan jalan daerah dapat disampaikan atau diusulkan masuk dalam Inpres Jalan Daerah (menggunakan anggaran BA BUN) dengan melihat kesiapan pembangunannya. - Inpres Jalan bisa menysasar kawasan prioritas, seperti pariwisata dan pertanian. Dalam setahun, bisa diusulkan dua. Tahap 1 tahun 2024 sudah lewat, bisa diusulkan pada tahap 2, tetapi perlu menunggu kebijakan - Untuk skema DAK belum bisa diputuskan saat ini karena belum dibuka menunya. - Untuk menu jembatan di DAK Afirmasi telah ada di tahun sebelumnya. 	<p>atau (2) mengusulkan menjadi Lokpri DAK Afirmasi.</p>
--	--	---	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<ul style="list-style-type: none"> - Tahap selanjutnya <i>appraisal</i> dan pengadaan lahan. - Target pembebasan lahan selesai bulan Agustus 2024. 						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
2	Pembangunan Jalan Baru Batas kota Singaraja-Mengwitani Titik 9 & 10 Kode: 10	4,85	4,85	km	Kab. Buleleng	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 – Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			004 - Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)
		Catatan dan Tanggapan						

**NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

PROVINSI BALI

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		-	-	-				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
3	Pembangunan Pelabuhan Sangsit Kode: 11	1	0	paket	Kab. Buleleng	Kementerian Perhubungan	Ditolak	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	RBP - Prasarana Bidang Konektivitas Darat		022 - Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				

Catatan Pimsid:

- Diarahkan untuk diusulkan melalui DAK 2025 bidang perairan (melalui menu rehabilitasi)
- Pemda perlu melengkapi

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Sangsit memiliki dua status, yaitu sebagai PPI dan Pengumpulan Regional - Status PPI sudah diserahkan oleh Pemerintah Kab. Buleleng ke Pemprov Bali yang saat ini UPTD Pelabuhan Perikanan sebagai pengguna aset. - Kegiatan yang telah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2019, Pelabuhan Sangsit dibangun menjadi pelabuhan terintegrasi. 2. Tahun 2020, penyusunan RIP. 3. Tahun 2022, penyusunan DPPT. 4. Tahun 2023, tindak lanjut pembangunan pelabuhan dengan Kemenhub. 5. Studi Amdal sedang berproses. 6. Pengajuan PPRL sedang berproses. 7. P3D diserahkan pertengahan tahun ini. - Jika masuk dalam rehabilitasi fungsinya sebaiknya menjadi pelabuhan perikanan. - Usulan lain dijadikan pelabuhan <i>multipurpose</i> (perikanan, perhubungan, pariwisata); atau 	<p>Kementerian Perhubungan (Biroren):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu menunggu P3D selesai. - RIPN perlu diselesaikan dulu baru bisa ditindaklanjuti. - Berdasarkan UU 23/2014, Pelabuhan Regional diserahkan ke Pemerintah Provinsi, Pelabuhan Lokal ke Pemerintah Kabupaten. - Jadi Pelabuhan Sangsit (aset, lahan) harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah provinsi, termasuk FS dan DED dan melengkapi RC, kemudian bisa ditindaklanjuti pengerjaannya. - Menu DAK untuk pembangunan pelabuhan baru pada tahun sebelumnya belum ada, hanya ada rehabilitasi. 	<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan ini belum masuk P3D. - Pelabuhan ini <i>multipurpose</i> (perikanan, perhubungan dan pariwisata), tetapi Dit. Transportasi tidak ada tupoksi untuk perikanan dan pariwisata. - Untuk ditangani pusat, aset pelabuhan harus menjadi milik pusat. - Diusulkan masuk dalam DAK menu rehabilitasi, karena pelabuhan ini sudah ada (bukan pembangunan baru). - Yang diusulkan menjadi DAK pada zona pengangkutan dan penyeberangan. - Perlu berkoordinasi dengan BPTD untuk bantuan teknis penyediaan <i>breakwater</i>. - Perlu sumber pendanaan alternatif dari daerah. 	<p>kriteria pengajuan sebagai lokpri DAK (yang diusulkan menjadi DAK pada zona pengangkutan dan penyeberangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dikawal oleh Pemda, Kemenhub, dan Dit. Transportasi Bappenas.
--	--	---	---	---	---

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>diarahkan ke pelabuhan penyeberangan seperti di Prov. Jawa Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dermaga saat ini sudah jebol dan penahan dermaga sudah lepas. - Pemanfaatan dermaga saat ini ialah menerima kapal barang dan ikan dalam boks. <p>Bappeda Provinsi Bali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami sudah berprogress memenuhi arahan Rakortekrenbang dengan P3D estimasi di pertengahan 2024. - Kami ingin memastikan dulu usulan ini diakomodir baru selanjutnya kami proses penyerahannya ke provinsi. Ini untuk menghindari pekerjaan tidak dilaksanakan setelah serah terima. - Isu utamanya untuk pemerataan pembangunan di Bali Utara - Jika melalui DAK, bisa dibuat lokprianya dulu secara tematik. - Pemda akan menunjuk operator setelah aset dikembalikan ke daerah. 				
No	Usulan	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
4	Pembangunan Pengamanan Pantai Cengceng Kembar di Kab. Jembrana Kode: 12	2,8	2,8	km	Kab. Jembrana	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai		RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			003 - Prasarana pengaman pantai yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
-		-		-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	Penataan Desa Bali Kuno Trunyan (Pembangunan Infrastruktur Pendukung Permukiman)	1	1	paket	Kab. Bangli	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

	Kode: 13	IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	002 - Pembangunan Baru Kawasan Permukiman	diakomodir di Rakortek			
Catatan dan Tanggapan									
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas					
		-	-	-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Pembangunan Pengaman Pantai Kalisada di Kab. Buleleng Kode: 14	580	580	m	Kab. Buleleng	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			003 - Prasarana pengaman pantai yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
				-	-	-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

7	Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Desa Adat Bonjaka Sebatu Tegalalang Gianyar Kode: 15	1258	1258	m ²	Kab. Gianyar	Kementerian LHK	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup	5456 - Pengelolaan Sampah		RBK - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			002 - Fasilitas Prasarana Penanganan Sampah	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		-		-		-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	Pembangunan SPAM Mata Air Kuta Lambi Bunutin Kode: 16	1	0	paket	Kab. Bangli	Kementerian PUPR	Ditolak <i>Catatan Pimsid:</i> - Pemda segera menyerahkan dokumen RC yang lengkap kepada pusat.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4973 - Penyelenggaraan Air Minum yang Layak		RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman			001 - Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		Catatan dan Tanggapan				- Pembahasan usulan ini dapat dilanjutkan dalam forum <i>Trilateral Meeting</i> apabila RC sudah diterima secara lengkap.
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
No	Usulan	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	
		<p>Bappeda Kab. Bangli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPAM ini diusulkan untuk memenuhi ketersediaan air di Geopark Batur dan mendukung UNESCO Global Geopark Batur. - Akses penyediaan air baku untuk jumlah total masyarakat 95 ribu jiwa masih di bawah 10%. - Ada tiga arah pembangunan: <i>intake</i>, transmisi, jaringan distribusi. - FS sudah selesai. - Ketersediaan lahan sudah dikoordinasikan dengan seluruh desa. - Saat ini sedang disusun DED untuk mengetahui berapa kebutuhan SPAM di Kuta Lambi dan akan selesai pada bulan November/Desember 2024. <p>Bappeda Provinsi Bali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ditolak, mohon dibuka alternatif melalui Inpres Air Minum, misalnya. 	<p>Kementerian PUPR (Dit. SSIP, Ditjen Cipta Karya):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dibahas di Konreg karena pada aplikasi SIPA, RC belum siap. - Mohon dapat menyampaikan RC yang lengkap untuk dibahas lebih lanjut. - Perlu waktu untuk pembahasan, sehingga harapannya DED dapat selesai pertengahan tahun. - Jika sudah siap, bisa dibahas dengan Direktorat Air Minum di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. 	<p>Dit. Perkim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dapat diakomodir di Musrenbangnas hanyalah yang sudah memiliki kesiapan RC yang lengkap (karena masih ada <i>review</i> dari Kementerian PUPR). - Inpres hanya dianggarkan untuk tahun 2024, Kab. Bangli belum masuk sama sekali, pelayanan JDU dan air minum. - Tahap usulan Inpres Tahap 1 & Tahap 2 sudah ditutup pada bulan Februari 2024 karena Maret 2024 akan ada verifikasi. Pembangunan tidak masuk dalam menu Inpres. 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
9	Penataan Pesisir Nusa Penida Kode: 17	1	1	paket	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung		RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan			002 - Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
-		-		-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan di Kusamba Kode: 18	1	1	paket	Kab. Klungkung	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	005 - Peremajaan Permukiman Kumuh	diakomodir di Rakortek			
Catatan dan Tanggapan									
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas					
		-	-	-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Pembangunan Pengaman Pantai Syahbandar di Kab. Karangasem Kode: 19	2	2	km	Kab. Karangasem	Kementerian PUPR	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			003 - Prasarana pengaman pantai yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		-	-	-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
12	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Kode: 2	5	5	unit	Prov. Bali: - Kab. Tabanan (1) - Kab. Badung (1) - Kab. Gianyar (1) - Kab. Karangasem (2)	Kementerian Perdagangan	Diakomodir <i>Catatan Pimsid:</i> - <i>Proposal based</i> masuk RKP dan Renja KL dan menunggu penentuan lokasi. - Perlu memastikan menu TP khususnya untuk pembangunan pasar. - Mengingat adanya PP 19 Tahun 2022 maka perlu <i>clearance</i> bahwa TP masih bisa dilaksanakan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		EF - Program Perdagangan Dalam Negeri	5090 - Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik		RBL - Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan			001 - Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Sekretaris Disperindag Bali : - Pasar di Tabanan: anggaran 4M, status tanah Pemda, proposal sudah ada, revitalisasi <i>all out</i> (kondisi kantor & pasar rusak). - Pasar di Badung: anggaran 6M, status tanah milik desa adat, proposal sudah lengkap, secara infrastruktur pasar sudah rusak (tidak bisa transaksi).		Kementerian Perdagangan : - Usul untuk dimasukkan dalam skema DAK, namun saat ini belum ada kejelasan terkait bidang dan menu (mungkin arahnya ke DAK bidang industri). - Kewenangan pembangunan pasar, berdasarkan UU 23/2014, ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menghambat pelaksanaan.		Dit. PIKEI : - PP 19/2022 mengatur dana Dekon dan TP. Pembangunan atau revitalisasi ada pada kewenangan daerah. - TP dimungkinkan di bawah pagu 12 M. - Kebijakan DAK sampai saat ini belum keluar sehingga tidak disarankan. - Tahun lalu Bali pernah mendapatkan DAK Pariwisata. Pasar Rakyat mendukung DAK Tematik Pariwisata.					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasar di Gianyar: anggaran 10 M, SHM sudah ada, proposal sudah lengkap, secara infrastruktur bangunan sudah rusak (tidak bisa transaksi). - Pasar di Karangasem (2 pasar): anggaran 3 M dan 6 M, sudah ada SHM dan proposal, kondisi infrastruktur pasar rusak sedang. 	- Skema TP biasanya 4-6 milyar.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Renja Kemendag, sudah ada terkait revitalisasi pasar. - Terkait PP 19/2022, perlu penjelasan sesuai dengan aturan yang berlaku. - Untuk Tabanan bisa diarahkan dengan mekanisme KPBU. - Terkait PP 19/2022, perlu adanya <i>clearance</i>. - Usulan perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. 	untuk usulan ini.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
13	Revitalisasi Zona 1A Kawasan Pariwisata Ulan Kode: 20	1	0	paket	Kab. Gianyar	Kementerian PUPR	Ditolak <i>Catatan Pimsid:</i> - RC sudah disampaikan sejak 2022, mohon ditelaah Kementerian PUPR - Usulan perlu dikawal Bappenas (Dit. Perkim)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung		RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan			002 - Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>Bappeda Kab. Gianyar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh RC sudah diinput pada Krisna Selaras dan SIPA (DED, RAB, legalitas lahan, FS, profil usulan, surat minat, surat pernyataan, dll) sejak tahun 2022. - Lahan sudah siap karena lahan milik Pemda. - Revitalisasi meliputi lahan parkir (Lapangan Parkir Astina), bukan permukiman. <p>Bappeda Provinsi Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgensi pembangunan Lapangan Parkir Astina untuk mengatasi penataan parkir di Ubud sebagai sentra pariwisata Bali. - Saat ini sudah ada pembangunan Pasar Tematik Ubud (dengan DAK) sehingga perlu diintegrasikan dengan sentral parkir. - Ini merupakan bagian dari revitalisasi pariwisata Bali. - Cakupan revitalisasi awalnya sangat kompleks, tetapi sekarang difokuskan ke sentra parkir. - Judul usulan sebaiknya diganti menjadi “Pembangunan Sentral Parkir Ubud”. 	<p>Kementerian PUPR (Dit. PKP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada prioritas penanganannya dalam program kerja Kementerian PUPR. - RC lengkap dan info terkait lahan belum diterima. - Kalau RC sudah diterima, perlu mendapatkan arahan pimpinan untuk tindak lanjut usulan ini. 	<p>Dit. Perkim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pariwisata belum menjadi prioritas, kecuali masuk dalam 10 Destinasi Prioritas Pariwisata atau ada direktif dari Presiden. - RC saat ini masih tahap <i>review</i>. - Ulan masuk KSPN tapi bukan prioritas, prioritas saat ini masih Babel dan Rajaampat, mungkin bisa diusulkan untuk berikutnya. 	<p>& Regional I) karena hasil identifikasi <i>white paper</i> Ulan. - Perlu penyesuaian nomenklatur usulan daerah menjadi “Pembangunan Lapangan Sentral Parkir Ubud”</p>
--	--	---	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		- Belum pernah diwacanakan untuk dikerjasamakan dengan swasta.						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
14	Pengembangan Armada Penangkapan Ikan dalam Rangka Regenerasi Nelayan	34	34	unit	Kab. Karangasem	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diakomodir <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan		KRO			RO

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

	Kode: 3	HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	003 - Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	diakomodir di Rakortek			
Catatan dan Tanggapan									
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					
-		-		-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
15	Pengembangan <i>Food Estate</i> di Jatiluwih dengan pola Pembangunan Kelembagaan Bersama Satu Pintu (KBS) Kode: 4	1	1	kawasan	Kab. Tabanan	Kementerian Pertanian	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		<i>Catatan Pimsid</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Pemda perlu mengubah proposal dan nomenklatur usulan menjadi “Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan”. 	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO		RO		
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5885 - Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		006 - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (MP FE)		
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>Dinas Pertanian Provinsi Bali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kendala RO. - Program kelembagaan bersama satu pintu dan kebanyakan alat bantu pertanian. - Biaya alat cukup besar, sehingga usulan ini perlu diakomodir (menjadi prioritas). - Terdapat usulan proposal untuk membuat bangunan, tetapi belum bisa diakomodasi sehingga diajukan usulan baru berupa alat pertanian. <p>Bappeda Provinsi Bali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokus di Subak Jatiluwih, bagian dari WWF - Jatiluwih sudah menerapkan sistem pertanian organik dengan produksi yang lumayan besar. - Jatiluwih akan dikembangkan sebagai agrowisata. 	<p>Kementerian Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomenklatur <i>Food Estate</i> masih mengacu pada Renduk di Sumsel dan Kalteng. Untuk usulan di luar provinsi tersebut bisa berkoordinasi dengan Direktorat PP. - Bisa mengusulkan alat pasca panen di Kementan. - Berdasarkan Rakortek Kementan, Bali masuk dalam lokpri, namun volumenya menyesuaikan. - Usul perubahan RO menjadi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan. 	<p>Dit. Pangan dan Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RO lebih tepat ke Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - RO diubah menjadi “Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan” untuk kemudian di-<i>upload</i> dalam e-proposal Kementan. 		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	Peningkatan Jejaring Bersama	150	150	orang	Kab. Klungkung	Kemdikbudristek	Diakomodir
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

Dunia Usaha dan Industri Kode: 5	01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		<i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek			
	Program		Kegiatan		KRO			RO		
	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		4262 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan		PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM			040 - Siswa SMK yang Tersertifikasi terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja		
	Catatan dan Tanggapan									
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					
	-		-		-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
17	Sirine Peringatan Dini Tsunami <i>Portable</i> dengan Spesifikasi Perangkat Sirine dengan Sistem Operasi Radio Digital dan GSM Kode: 6	38	0	unit	- Kab. Badung - Kab. Gianyar - Kab. Klungkung - Kab. Buleleng - Kota Denpasar	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Ditolak <i>Catatan Pimsid:</i> Untuk EWS diarahkan menggunakan dana APBD.			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
		Program		Kegiatan		KRO		RO		
		FA - Program Ketahanan Bencana		4284 - Peringatan Dini		QEG - Bantuan Peralatan / Sarana		001 - Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		BPBD Provinsi Bali : - Tsunami merupakan salah satu dari lima bencana prioritas di Bali (<i>high risk</i> , pertumbuhan risiko cepat). - Bali sudah membangun sistem peringatan dini tsunami, perlu ditambah lagi 38 desa. - Anggaran 2,5 M	BNPB : - Sumber pendanaan RM (APBN) hanya untuk banjir dan tanah longsor. Untuk gempa dan tsunami, <i>Early Warning System</i> (EWS) menggunakan <i>loan</i> IDRIP (Bank Dunia). - Saat ini (2024), proyek IDRIP masih fokus pemasangan EWS di 6 desa di Jembrana. Untuk tahun 2025, belum ada indikasi lokasi di Bali.	Dit. TRPPB : - Proyek ini akan di fokuskan di Jembrana dengan sumber pendanaan IDRIP. - Perlu koordinasi dengan BNPB untuk kegiatan ini. - Untuk lokasi lainnya belum ada di kegiatan IDRIP sehingga menunggu respons dari BNPB.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
18	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa Kode: 7	7	7	BUMDes	- Kab. Jembrana (2) - Kab. Klungkung (1) - Kab. Karangasem (2) - Kab. Buleleng (2)	Kementerian Desa PDTT	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		<i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah diakomodir di Rakortek
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan		KRO		RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		CT - Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	6469 - Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	QDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	002 - Fasilitas Pengembangan BUMDesa				
Catatan dan Tanggapan									
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		-	-		-				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	Repeater Digital Kode: 8	11	11	unit	- Prov. Bali - Kab. Tabanan - Kab. Klungkung - Kab. Karangasem - Kab. Buleleng	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Diakomodir <i>Catatan Pimsid:</i> - Perlu pembahasan konfirmasi alokasi jumlah repeater dari BNPB. - Lokasi penanganan perlu diprioritaskan.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FA - Program Ketahanan Bencana	4284 - Peringatan Dini		QEG - Bantuan Peralatan / Sarana			001 - Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana	
		Catatan dan Tanggapan							
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

		<p>BPBD Provinsi Bali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bali telah memutuskan beralih teknologi dari komunikasi analog ke radio digital. - Peralihan ini sudah dimulai, tapi butuh percepatan untuk mengcover seluruh wilayah Bali. - Repeater digital digunakan untuk peringatan dini, untuk pelacakan armada dan sarana komunikasi. - Unit pengendali, personel, regulasi sudah ada semua. - Proposal beserta lokasi penempatan repeater sudah dikirimkan ke BNPB bulan Maret 2024. - Anggaran 2,5 milyar bisa mengcover radio digital 100% dengan dengan 11 repeater. - Pusdalops sudah ada. 	<p>BNPB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisa diarahkan ke pembiayaan rupiah murni. - Perlu dibuat urutan prioritas lokasi repeater. - Pusdalops idealnya sudah terbentuk, termasuk sarana prasarana dan personel yang akan berjaga selama 24 jam. 	<p>Dit. TRPPB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal dari BPBD tidak ada dalam lokasi kegiatan. 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
20	Perluasan Tempat Melasti Desa Adat Tukad Besi dan Culik, Desa Purwa Kerthi,	40	40	m	Kab. Karangasem	Kementerian PUPR	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		<i>Keterangan:</i> Tidak dibahas karena sudah
		01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI BALI

Kec. Abang, Kab. Karangasem Kode: 9	Program	Kegiatan	KRO	RO	diakomodir di Rakortek
	FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	003 - Prasarana pengaman pantai yang dibangun	
	Catatan dan Tanggapan				
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
	-	-	-		

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	15
Ditolak	5
Tidak Terbahas	0